



**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI  
PEMERINTAH 2023  
KECAMATAN TOMONI TIMUR**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Kondisi Geografis.....	2
1.2 Data Umum Organisasi.....	3
1.3 Struktur/Kondisi Organisasi.....	6
1.4 Peran Organisasi .....	7
1.5 Isu Strategis .....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
2.1 Rencana Strategis 2022-2026.....	9
2.2 Perencanaan Kinerja Tahun 2023.....	Error! Bookmark not defined.11
2.3 Perencanaan Kinerja Tahun 2023 .....	<b>Error!</b>
<b>Bookmark not defined.</b>	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	20
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	21
<b>Sasaran 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kec. Tomoni Timur</b>	<b>21</b>
1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.....	21
2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2020 dan Beberapa Tahun Terakhir.....	23
3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	24
4. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	25
5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	25
6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	26
<b>Sasaran 2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Tomoni Timur</b>	<b>31</b>
1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 .....	32
2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2020 dan Beberapa Tahun Terakhir.....	33
3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	34

4.	Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. ....	34
5.	Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya .....	35
6.	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	35
	<b>3.2 Realisasi Anggaran .....</b>	<b>41</b>
	<b>BAB IV_PENUTUP .....</b>	<b>46</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah ASN Berdasarkan Golongan .....	3
Tabel 1.2 Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan .....	4
Tabel 1.3 Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan .....	4
Tabel 1.4 Jumlah ASN Berdasarkan Status Kepegawaian .....	5
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	12
Tabel 2.2 APBD Perubahan Tahun 2023 .....	13
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	18
Tabel 3 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	20
Tabel 3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun ini .....	21
Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya.....	23
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Terhadap Target Jangka Menengah .....	24
Tabel 3.4 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun ini .....	32
Tabel 3.5 Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya .....	33
Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Terhadap Target Jangka Menengah ( Renstra 2016-2021).....	34
Tabel 3.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	35
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Tahun 2023 .....	41

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (LAKIP) Kecamatan Tomoni Timur dapat kami selesaikan.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap Instansi Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan yang berlaku. Hal yang paling utama dalam penyusunan LAKIP ini merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban dari tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang telah menjadi tanggung jawab Kecamatan Tomoni Timur sebagai sarana umpan balik untuk selalu melakukan perbaikan dalam perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan.

Kami sangat menyadari dalam penyusunan LAKIP ini masih terdapat banyak kekurangan baik dalam penyampaian isi materi maupun teknik penulisannya, oleh karena itu kami tidak menutup diri untuk menerima perbaikan, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna penyempurnaannya. Akhirnya kami berharap semoga LAKIP Kecamatan Tomoni Timur Tahun 2023 ini dapat berguna bagi semua pihak dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Tomoni Timur, Januari 2024  
Camat Tomoni Timur

**Herpik, SKM, M.Kes**  
NIP. 19660814 198903 1 016

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

---

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan pelaksanaan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Untuk mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Tomoni Timur selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah dituntut untuk meningkatkan kinerja. Peningkatan kinerja diharapkan mampu menghadirkan pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel. Adapun tujuan pelaporan kinerja adalah Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang diharapkan dengan realisasi yang terjadi. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan kabupaten, provinsi dan pusat.

Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Tentu harapan tersebut perlu pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil, bersih dan dapat dipertanggungjawabkan serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel di Kecamatan Tomoni Timur diperlukan penerapan *good governance*. Dimana terselenggaranya *good governance* merupakan persyaratan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang aspiratif, mengutamakan kepentingan rakyat banyak dan berkeadilan.

Sebagai media pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan melaksanakan misi organisasi, Kecamatan Tomoni Timur menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 dalam upaya mewujudkan *good governance* yang dicita-citakan yang mempunyai pilar-pilar transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

### **1.1 Kondisi Geografis**

Luas wilayah Kecamatan Tomoni Timur 43,91 km<sup>2</sup> Kecamatan Tomoni Timur terdiri dari 8 (Delapan) Desa definitif. Adapun Desa dimaksud masing-masing :

1. Desa Margomulyo
2. Desa Kertoraharjo
3. Desa Purwosari
4. Desa Pattengko

5. Desa Cendana Hitam Timur
6. Desa Cendana Hitam
7. Desa Alam Buana
8. Desa Manunggal

Jumlah Penduduk Kecamatan Tomoni Timur pada Tahun 2023 sebanyak 13.545 jiwa (Laporan Penduduk Per Desember 2023) dengan rincian : laki-laki sebanyak 6.899 jiwa dan perempuan sebanyak 6.646 jiwa. Penduduk Kecamatan Tomoni Timur merupakan penduduk yang heterogen baik Suku maupun Agama. Adapun Suku dan Agama di Kecamatan Tomoni Timur yaitu Suku Jawa, Bali, Lombok, Batak, Bugis, Toraja, Pamona dan Agama Islam, Kristen dan Hindu.

## 1.2 Data Umum Organisasi

Secara keseluruhan keadaan dan jumlah Aparatur di Kantor Kecamatan Tomoni Timur per tanggal 31 Desember 2023 adalah 14 (Empat belas) orang PNS dan 9 (sembilan) orang Non PNS dengan rincian sebagai berikut :

### 1. Berdasarkan Golongan

**Tabel 1.1**  
**Jumlah ASN Berdasarkan Golongan**

NO.	GOLONGAN	RUANG				JUMLAH
		A	B	C	D	
1	Golongan IV	-	1	-	-	1
2	Golongan III	5	2	1	4	12
3	Golongan II	-	-	-	1	1
4	Golongan I	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>14</b>

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

## 2. Berdasarkan Pendidikan

**Tabel 1.2**  
**Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan**

NO.	GOLONGAN	JENJANG PENDIDIKAN				JUMLAH
		S2	S1/D4	D2/D3	SMA/SMP	
1	Golongan IV	1	-	-	-	1
2	Golongan III	3	6	-	3	12
3	Golongan II	-	-	-	1	1
4	Golongan I	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>4</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>14</b>

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

## 3. Berdasarkan Jabatan

**Tabel 1.3**  
**Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan**

NO.	JABATAN	ESELON				JUMLAH
		II.B	III.A/B	IV.A/B	NON ESELON	
1	Struktural	-	2	6	6	14
2	Fungsional	-	-	-	-	-
3	Fungsional Umum	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>-</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>14</b>

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

4. Berdasarkan Status Kepegawaian

Tabel 1.4

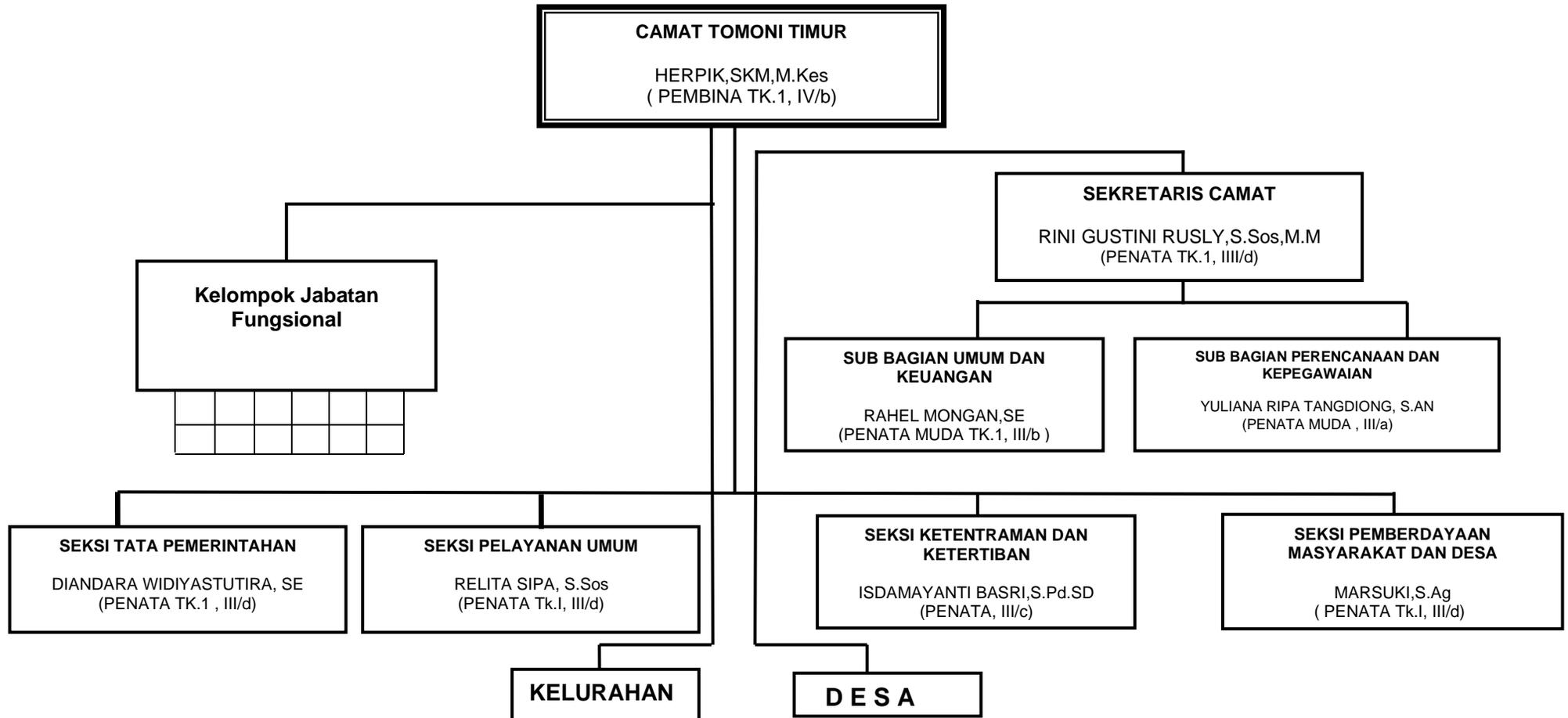
Jumlah ASN Berdasarkan Status Kepegawaian

<b>NO.</b>	<b>STATUS KEPEGAWAIN</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>1</b>	PNS	14
<b>2</b>	CPNS	-
<b>3</b>	PTT	-
<b>4</b>	UPAH JASA	9
<b>JUMLAH</b>		<b>23</b>

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

### 1.3. Struktur/Kondisi Organisasi

#### STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN TOMONI TIMUR



#### **1.4. Peran Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Luwu Timur. Organisasi Kecamatan merupakan satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai peran sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di wilayah kecamatan yang menjadi kewenangan daerah. Satuan kerja perangkat daerah kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **1.5. Isu Strategis**

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan Pemerintah Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur dituntut lebih transparan, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi ke depan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan lebih tepat sasaran. Untuk itu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Adapun isu-isu yang akan dihadapi Kecamatan Tomoni Timur tidak terlepas dari permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Luwu Timur antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata kelola pemerintahan

Isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif sebagaimana disebutkan dalam Renstra Kecamatan Tomoni Timur yang mencakup strategi kebijakan program dan kegiatan. Implikasi terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang cepat, tepat, efisien dan transparan
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) untuk mewujudkan akuntabilitas
3. Menetapkan kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat

Memperhatikan isu-isu yang dipermasalahkan diatas terkait pelayanan kepada masyarakat,diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan mampu mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

---

#### 2.1. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Renstra SKPD adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis, yang akan menjadi acuan dalam penilaian kinerja SKPD oleh lembaga auditor baik internal ataupun eksternal. Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Indikator Kinerja Program, Strategi Pembangunan, Kebijakan, Program dan Sasaran serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 tahun ke depan mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global, namun berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan Rencana Strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya. Rencana Strategis Kecamatan Tomoni Timur Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik bagi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang berkesinambungan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dimaksudkan untuk :

1. Menyediakan dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun mendatang (2021-2026), yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
2. Menyediakan pedoman dan landasan dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi perangkat kecamatan dan desa secara terfokus dan berdasarkan prioritas kebutuhan.
3. Menyediakan instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan untuk mengarahkan pegawai dan mengalokasikan sumber daya secara optimal dalam pencapaian tujuan organisasi.
4. Menyediakan instrumen awal untuk pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pemangku kepentingan dalam rangka menilai kinerja Kecamatan Tomoni Timur.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah untuk :

1. Menciptakan keterpaduan langkah bagi seluruh unit kerja yang ada dalam melaksanakan tugas serta kegiatan yang telah disepakati.
2. Meningkatkan efektivitas tercapainya tujuan dan sasaran organisasi melalui kesungguhan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

#### ❖ **Visi dan Misi**

Pada dasarnya rencana Strategis (Renstra) OPD harus berpedoman pada Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur, agar pencapaian tujuan dalam pembangunan daerah terdapat sinkronisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Visi dan Misi Kecamatan Tomoni Timur sesuai dengan RPJMD Kabupaten Luwu Timur. Adapun Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah :

**“Luwu Timur Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan  
Nilai Agama dan Budaya”**

Sebagai penjabaran visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur diatas disusunlah misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Misi yang disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang ingin dicapai dalam pembangunan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021–2026 dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh;
2. Mengembangkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas;
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas;
4. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik;
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat;
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya.

## **2.2. Perencanaan Kinerja Tahun 2023**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran maupun kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja merupakan pedoman bagi penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Kecamatan Tomoni Timur telah menyusun Rencana Kinerja Tahun 2023 meliputi penetapan sasaran yang akan dilaksanakan berikut indikatornya, program dan kegiatan disertai indikator kinerja kegiatan. Kemudian selanjutnya Kecamatan Tomoni Timur menyusun Perjanjian

Kinerja, Perjanjian kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh Pimpinan Instansi dilingkup pemerintahan. Penyusunan Perencanaan Kinerja mengacu pada Dokumen Renstra Kecamatan Tomoni Timur Tahun 2021-2026. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, Dokumen Renja Tahun 2023 dan DPA Tahun Anggaran 2023. Kecamatan Tomoni Timur telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni Timur	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,88
2.	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni Timur	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten di Kecamatan (%)	100

NO	Program	Anggaran	Ket
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.367.642.250	
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 9.891.000	
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 53.315.000	
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 12.280.000	
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 24.680.000	
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 23.015.000	

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

**Tabel 2.2**  
**APBD Perubahan Tahun 2023**

SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	PAGU
<b>Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Kecamatan</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>100%</b>	<b>9.891.000</b>
	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>6.665.000</b>
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100 %	6.665.000
	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>100%</b>	<b>3.226.000</b>
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	100 lembar	3.226.000
	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>74.615.300</b>
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>100%</b>	<b>74.615.300</b>
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	100%	13.315.000
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	85 Orang	61.300.300

	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>100%</b>	<b>12.280.000</b>
	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>100%</b>	<b>12.280.000</b>
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8 Kali (Kasus)	7.365.000
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Kali	4.915.000
	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>100%</b>	<b>20.000.000</b>
	<b>Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah</b>	<b>100%</b>	<b>20.000.000</b>
	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	4 Kali	20.000.000
	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>100%</b>	<b>25.015.000</b>
	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>100%</b>	<b>25.015.000</b>
	Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	22 dokumen	15.000.000
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan	8 Desa	10.015.000

<b>Meningkatnya Capaian kinerja dan keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni Timur</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>2.519.931.950</b>
	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>52.068.000</b>
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	19.945.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	2.784.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 dokumen	2.786.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	26.553.000
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.529.465.550</b>
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 Orang	1.507.703.550
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Dokumen	21.762.000
	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>12.480.000</b>
	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	4 Dokumen	12.480.000
	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>35.456.000</b>
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	6.996.000
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	3 Orang	28.460.000

	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>409.409.000</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15 Jenis	3.080.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 Jenis	5.567.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2700 Lembar	7.425.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	48 Exp	6.240.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3150 Kotak	162.765.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	472 Kali	224.332.000
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>71.000.000</b>
	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	4 Unit	36.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	35.000.000
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>159.173.400</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900 surat	13.635.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Rek	27.538.400
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Unit	13.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8 org	105.000.000

	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>250.880.000</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 unit	18.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9 Unit	7.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 Unit	225.880.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>100%</b>	<b>2.661.733.250</b>

Sumber : Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

### 2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tomoni Timur

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Adapun IKU Pemerintah Kecamatan Tomoni Timur yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 2.3**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tomoni Timur**

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Tomoni Timur	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	$IKM = \frac{\text{Total Nilai persepsi Perunsur}}{\text{Total Unsur Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Kuesioner	Seksi Pemerintahan Umum, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Seksi Pelayanan Umum
2	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Tomoni Timur	Nilai LAKIP Kecamatan Tomoni Timur	Nilai	Hasil Penilaian Inspektorat	Laporan, Kegiatan	Seksi Pemerintahan Umum, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Pelayanan Umum, Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian, dan Subbagian Umum dan Keuangan

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal	TARGET					Kondisi Akhir
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan kapasitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan	Tingkat pertumbuhan IKM			0,55	0,55	0,62	1,47	1,82	2,04	2,25
			Meningkatnya kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,86	87,86	87,88	87,88	88	88,5	88,6
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat kecamatan	Nilai LAKIP Kecamatan			65,5	65,5	65,92	70,1	72,5	73,5	75,5
			Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten di Kecamatan	100	100	100	100	10	100	100

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

---

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan pemerintahan yang telah diperjanjikan sebelumnya, maka sebagai wujud tanggungjawab Kantor Kecamatan Tomoni Timur menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023 secara sistematis untuk menyajikan keberhasilan, hambatan serta permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Sasaran Staregis.

Dalam melakukan evaluasi keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja setiap sasaran, maka digunakan skala pengukuran 5 (lima) kriteria sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤	Sangat Tinggi
2	76 % s.d 90 %	Tinggi
3	66 % s.d 75 %	Sedang
4	51 % s.d 65 %	Rendah
5	50 %	Sangat Rendah

**Sumber Data: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017**

### 3.1. Capaian IKU Tahun 2023

Pengukuran capaian kinerja yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok input, proses, output, outcome, benefit dan impact, menentukan satuan setiap kelompok indikator, menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan, menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan persentasenya. Pencapaian terhadap IKU Kantor Kecamatan Tomoni Timur akan digambarkan per Sasaran Strategis, sebagai berikut:

**Sasaran 1. Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni Timur**

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ke-4 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **"Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik"**, dan tujuan **"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik"**. Sasaran ini didukung oleh Kantor Kecamatan Tomoni Timur sebagai leading sector pelaksanaan pelayanan public di tingkat kecamatan.

#### 1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.1

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun ini

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)	Predikat
1	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni Timur	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,88	91,72	104,36	Sangat Tinggi

Sumber :Seksi Pelayanan Umum

$$\text{Rumus : \% Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

**a. Analisis Capaian kinerja sasaran pertama sebagai berikut:**

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat persentase capaian mencapai 91,72% dari target yang direncanakan. Ini berarti hasil yang dicapai sudah baik. Hasil survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan perizinan maupun non perizinan Tahun 2023 Kecamatan Tomoni Timur berdasarkan 9 (sembilan) pertanyaan sesuai peraturan Menpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Untuk mendapatkan capaian kinerja pada indikator survei kepuasan masyarakat (SKM) dengan menggunakan kuesioner yang mengajukan permohonan pelayanan yang dibagikan pada setiap pengunjung yang datang pada Kantor Kecamatan Tomoni Timur, termasuk juga kuesioner indikator responden yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, menunjukkan realisasi baik dari target 87,88 atau melampaui target dengan nilai survei 91,72. Sasaran pertama yaitu meningkatkan kinerja pelayanan publik di Kecamatan Tomoni Timur.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai terendah sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan. Berdasarkan hasil tersebut maka diambil kesimpulan :

- 1) Nilai dalam kelompok paling rendah yang harus ditingkatkan adalah unsur kesesuaian persyaratan dengan jenis pelayanannya nilai **648**.

❖ **Faktor penghambat** kenapa kecamatan Tomoni Timur pada unsur kesesuaian persyaratan dengan jenis

pelayanannya disebabkan karena belum adanya persyaratan yang jelas untuk setiap jenis pelayanan.

❖ **Solusi** untuk permasalahan unsur kesesuaian persyaratan dengan jenis pelayanannya adalah dengan membuat papan informasi yang berisi berbagai jenis pelayanan beserta persyaratannya, sehingga masyarakat yang datang bisa langsung melihat persyaratan untuk jenis pelayanan yang akan dilakukan.

2) Nilai kelompok yang paling tinggi yang harus dipertahankan pada unsur kewajaran biaya/tariff dalam pelayanan dengan nilai **818**.

❖ **Faktor pendukung** kenapa Kecamatan Tomoni Timur pada unsur kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan mendapat nilai tinggi, disebabkan karena memang pelayanan di kantor kecamatan Tomoni Timur tekhusus pelayanan kependudukan tidak dipungut biaya apapun (gratis).

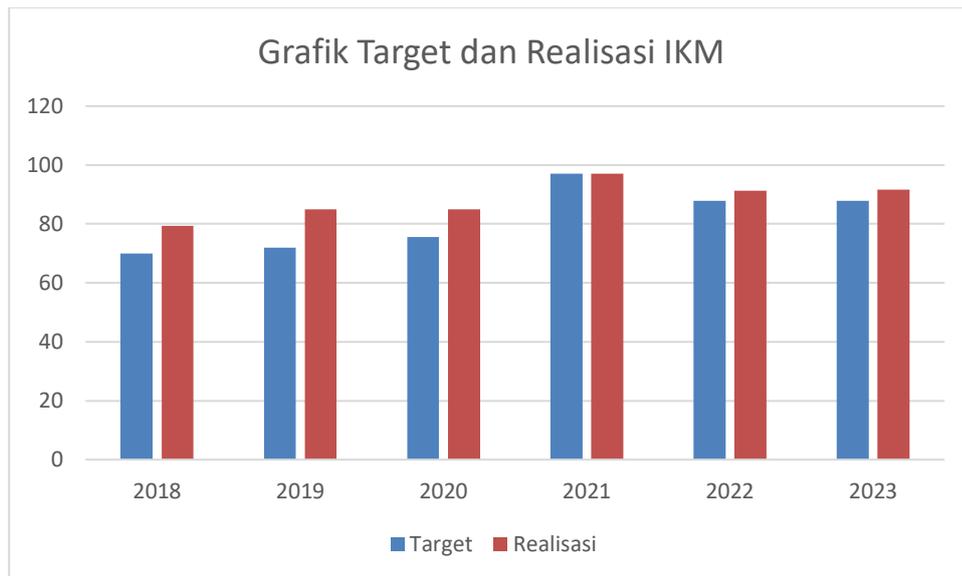
## 2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Beberapa Tahun Terakhir

Adapun perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**

NO	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Predikat
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	2018	70	79,35	Tinggi
2		2019	72	85	Tinggi
3		2020	75,5	85	Tinggi
4		2021	97	97	Sangat Tinggi
5		2022	87,88	91,22	Sangat Tinggi
6		2023	87,88	91,72	Sangat Tinggi

Sumber : Seksi Pelayanan Umum



Berdasarkan grafik diatas, maka dapat dilihat perbandingan capaian kinerja Tahun 2018, Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023. Pada setiap tahunnya realisasi Survei Kepuasan Masyarakat mengalami peningkatan dan melampaui target yang telah ditentukan.

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan Target yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 3.3

Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Dengan 2023 Terhadap Target Renstra

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	RENSTRA
			2023	2023	
1	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni Timur	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,88	91,72	92,27

Sumber : Seksi Pelayanan Umum

Dengan melihat table capaian diatas, Indeks Kepuasan Masyarakat yang terealisasi hingga tahun 2023 sebesar 91,72 atau setara dengan 104% dengan Predikat Sangat Tinggi, Target nilai IKM pada akhir periode Renstra 2021-2026 yaitu 93,02 jika Realisasi Tahun 2023 dibandingkan dengan target IKM akhir periode Renstra, maka persentase capaian IKM sampai dengan tahun 2023 adalah 98%. Target ditahun 2023 memiliki peluang yang besar untuk dapat tercapai. Terkait indikator tersebut, diharapkan Kantor Kecamatan Tomoni Timur untuk lebih meningkatkan segala aspek yang mendukung terwujudnya indikator tersebut seperti ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, sarana dan prasarana serta sumber anggaran, sehingga nantinya sasaran yang akan dicapai yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Tomoni Timur dapat terwujud.

#### **4. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan analisis pencapaian kinerja guna memberikan gambaran atau informasi yang transparan mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja yang telah dilakukan.

Adapun hal yang mempengaruhi peningkatan kinerja yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun beberapa hal yang mempengaruhi kinerja pelayanan kepada masyarakat yaitu :

- a. Perubahan Peraturan terkait Perizinan yang tidak lagi menjadi wewenang pemerintah kecamatan.
- b. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai

#### **5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Keterbatasan sumber daya sarana dan sumber daya manusia dalam menyampaikan informasi tentang syarat dan ketentuan dalam

elayanan perizinan dan non perizinan di Kecamatan Tomoni Timur dapat terfasilitasi dengan adanya papan informasi, brosur dan banner yang ditempatkan ruang pelayanan di kecamatan dan desa/kelurahan sehingga dengan sendirinya masyarakat dapat langsung melihat informasi terkait syarat dan ketentuan pengurusan pelayanan perizinan dan non perizinan.

## **6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Adapun program dan kegiatan yang mendukung sasaran ini yaitu:

### **A. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik :**

1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha

Pada tahun 2023 tidak ada lagi kegiatan pelayanan perizinan yang dilakukan, di sebabkan sejak tanggal 2 Agustus 2021 untuk sementara pelaksanaan perizinan seperti IMB dan yang lainnya diambil alih oleh kabupaten. Tetapi untuk pelayanan umum lainnya masih tetap di fasilitasi di kecamatan seperti surat ahli waris, keterangan pindah penduduk, serta pengantar pembuatan KTP

#### **❖ Hambatan :**

a) Belum ada peraturan yang baru terkait pelaksanaan pelayanan perizinan di kecamatan.

#### **❖ Solusi :**

a) Tetap melaksanakan sosialisasi terkait pelayanan perizinan terutama tata cara pengurusan perizinan dan syarat – syarat kelengkapan berkas.

2) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan

- a. Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait

Pada Tahun 2023 banyak kegiatan yang dilakukan pada sub kegiatan ini seperti Apel Siaga awal Tahun, apel Festival Ogoh-ogoh, apel hari Raya Nyepi, Apel menyambut Bulan Suci Ramadhan, Apel Natal, Apel pergantian tahun, Penertiban APK, dan pengamanan hari raya/ hari besar keagamaan.

Tidak ada hambatan dalam melaksanakan kegiatan ini dan dapat terlaksana dengan baik sehingga situasi di wilayah Kecamatan Tomoni Timur berada dalam keadaan kondusif.

## **B. Program Pemberdayaan Masyarakat**

### 1) Koordianasi kegiatan pemberdayaan

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa

Target pada sub kegiatan ini adalah persentase keterwakilan perempuan dalam pelaksanaan musrenbang mencapai 40%. Musrenbang Kecamatan Tomoni Timur dilaksanakan pada Bulan 24 Februari 2023, masing-masing Desa/Kelurahan mengusulkan sebanyak 7 kegiatan prioritas dengan total 56 usulan. Setelah dilakukan musyawarah dan verifikasi oleh BAPPEDA, usulan yang terealisasi pada tahun 2024 sebanyak 16 kegiatan prioritas.

#### ❖ **Hambatan :**

- a) Masih kurangnya partisipasi perempuan dalam menyampaikan usulan dalam musrenbang.

#### ❖ **Solusi :**

- a) Memberikan pemahaman kepada tokoh perempuan terkait pelaksanaan musrenbang.

b. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan

Target dalam sub kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan PKK pada 8 Desa di Kecamatan Tomoni Timur. Kegiatan PKK untuk tingkat Kecamatan yaitu :

- a) Memfasilitasi administrasi PKK Desa/Kelurahan;
- b) Memfasilitasi Program/Kegiatan PKK Desa/Kelurahan;
- c) Pendampingan kegiatan pemberdayaan yang dibina oleh PKK Desa/Kelurahan.

Sepanjang tahun 2023 PKK kecamatan Tomoni Timur melakukan beberapa kegiatan diantaranya Lomba Kampung Organik, Lomba Dasawisma, Lomba Posyandu terintegrasi dan lomba senam lansia. Kegiatan PKK pada tahun 2023 sebagian besar berkaitan dengan penertiban administrasi PKK Desa dan beberapa perlombaan baik ditingkat kecamatan maupun di tingkat Kabupaten.

❖ **Hambatan :**

- a) Sumber Daya Manusia terbatas.

❖ **Solusi :**

- a) Melakukan bimbingan teknis bagi pengurus PKK untuk peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.

**C. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

a. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Target yang ingin dicapai dalam Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimka) adalah semua rekomendasi yang masuk dikecamatan 100 % harus diselesaikan. Kegiatan Rapat Koordinasi Forkopimka dilakukan apabila terdapat persoalan yang

harus dibahas oleh lintas sektor se-Kecamatan Tomoni Timur. Berikut adalah beberapa hal yang dibahas dalam rapat Forkopimka Tahun 2023 :

- a) Pertemuan dengan beberapa lintas sektor terkait peningkatan mutu dan pelayanan Kesehatan di Kecamatan Tomoni Timur.
- b) Menindaklanjuti permasalahan pelaksanaan shalat Idul Fitri.
- c) Persiapan HUT Republik Indonesia ke 78.

❖ **Hambatan :**

- a) Sinergitas antara FORKOPIMKA, pemerintah desa/kelurahan dan unit kerja lingkup Kecamatan Tomoni Timur belum maksimal.

❖ **Solusi:**

- a) Lebih meningkatkan koordinasi antara sesama unsur-unsur terkait.

#### **D. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah

a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Target dalam sub kegiatan ini adalah terbentuknya Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sehingga APBDes dapat dicairkan. Dalam pelaksanaannya, terdapat 8 Rancangan Peraturan Desa dan 8 Rancangan Peraturan Kepala Desa dengan total 16 Peraturan yang dibuat oleh Desa sebelum memasuki tahun anggaran 2023, Rancangan Peraturan tersebut kemudian diverifikasi oleh Tim Fasilitasi dan Evaluasi kecamatan lalu dibuatkan surat pengantar untuk dapat di teruskan dan diverifikasi kembali oleh Dinas PMD, setelah diverifikasi, Rancangan Peraturan tersebut

kemudian disahkan sebagai Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, sebelum APBDes dicairkan, Desa mengajukan Peraturan yang telah dibuat kepada Camat Tomoni Timur untuk mendapatkan rekomendasi pencairan APBDes.

Pada pertengahan tahun berjalan akan terjadi perubahan anggaran sehingga desa akan membuat 8 Peraturan Desa (Perubahan) dan 8 Peraturan Kepala Desa (Perubahan). Sehingga total Peraturan terkait APBDes yang dibuat oleh desa selama 1 (satu) tahun adalah sebanyak 32 Peraturan. Pencairan APBDes dilakukan dalam 2 (dua) tahap selama 1 (satu) tahun anggaran.

❖ **Hambatan :**

- a) Keterlambatan Informasi terkait aturan penyusunan APBDes.
- b) Peraturan Bupati terkait pagu indikatif terlambat ditetapkan.
- c) Belum adanya peningkatan kapasitas SDM di kecamatan terkait kegiatan perencanaan desa.

❖ **Solusi :**

- a) Melakukan konsultasi dan koordinasi yang lebih intensif dengan pihak terkait.
  - b) Menggunakan estimasi anggaran tahun sebelumnya.
  - c) Pengusulan kegiatan bimbingan teknis perencanaan APBDes kepada SKPD terkait.
- b. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Target dalam sub kegiatan ini adalah jumlah desa dalam wilayah kecamatan yang terpantau perencanaan dan pelaksanaan programnya dalam wilayah Kecamatan Tomoni Timur.

❖ **Hambatan :**

- a) Masih ditemui pelaksanaan dan perencanaan tidak berjalan dengan baik sehingga hasil pekerjaan tidak maksimal.
- b) Masih adanya pengaduan masyarakat terkait hasil pekerjaan yang tidak sesuai harapan masyarakat.

❖ **Solusi :**

- a) Memberikan masukan kepada pemerintah desa untuk merencanakan dengan matang program – program pembagunan yang akan dilaksanakan sehingga hasil yang di dapatkan maksimal dan sesuai dengan harapan masyarakat.

#### **E. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Target yang ingin dicapai program ini adalah terciptanya sinergitas dengan aparat Kepolisian, TNI dan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda serta Instansi vertikal dan perangkat daerah alam menciptakan situasi ketenraman dan ketertiban yang aman serta penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah daerah.

❖ **Hambatan :**

- a) Tidak ditemukan hambatan yang berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan di sebabkan oleh karena tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya situasi aman dan damai dalam kehidupan sehari – hari. Dan juga di sebabkan oleh pengalaman warga di wilayah kecamatan ini yang sempat teribat konflik antar etnis yang membawa korban jiwa.

**Sasaran 2. Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni Timur**

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ke-4 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **"Menciptakan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik"**, dan tujuan **"Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan"**. Sasaran ini didukung oleh Kantor Kecamatan Tomoni Timur, kaitannya dengan Pelaksanaan Tata Pemerintahan dilingkup kecamatan.

Sebagai catatan untuk Nilai SAKIP sampai saat laporan ini disusun, Inspektorat Kabupaten Luwu Timur belum mengeluarkan Laporan Hasil Evaluasi LAKIP Tahun 2023, sehubungan hal tersebut maka pengukuran capaian Indikator Kinerja ini masih mengacu pada capaian tahun sebelumnya sebagai berikut:

#### 1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022 dan tahun 2023

Adapun perbandingan antara target dan realisasi pada tahun 2022 dan tahun 2023 terkait sasaran 2 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2023 :**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Target 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Capaian 2022	Capaian 2023
1	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan urusan Pemerintah Kecamatan Tomoni Timur	Nilai LAKIP	70,1	72,5	55 (CC)	-	78,45	-

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

#### a. Analisis Capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

Berdasarkan tabel diatas, maka untuk tahun 2023 belum dapat dilihat persentase capaian kinerja sasaran 2 (dua) karena masih menunggu hasil evaluasi yang dilakukan inspektorat Kabupaten

Luwu Timur. Sedangkan untuk tahun 2022 nilai LAKIP Kecamatan Tomoni Timur adalah 55 (CC) dari target 70,1 ini berarti bahwa hasil yang dicapai belum maksimal, tidak mencapai target yang telah ditentukan, masih perlun banyak perbaikan.

## 2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Beberapa Tahun Terakhir

Adapun perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**

NO	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian %	Predikat
1	Nilai Score LAKIP (n-1)	2019	-	-	-	-
2		2020	55	60	109%	Sangat Tinggi
3		2021	65,92	55	83,43%	Tinggi
4		2022	70,1	55	78,45	Tinggi
5		2023	72,5	-	-	-

Sumber :Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat perbandingan capaian kinerja pada tahun 2020 mendapat nilai 60 dari target 55, pada Tahun 2021 mendapat nilai 55 dari target 65,92 sehingga dapat disimpulkan, perolehan nilai LAKIP kantor Kecamatan Tomoni Timur mengalami penurunan capaian pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022.

**3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Terhadap Target Jangka Menengah ( Renstra 2021-2026)**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	RENSTRA
			2022		
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Kecamatan Tomoni Timur	Nilai Score LAKIP (n-1)	70,1	55	70,1

**Sumber :Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian**

Berdasarkan capaian kinerja pada tahun 2022 yaitu Skor LAKIP 55. Nilai SAKIP yang diraih Tahun 2022 ini menunjukkan trend yang positif dimana dari tahun ke tahun nilainya cenderung naik.

**4. Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.**

Ada beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator tersebut yaitu :

- a. Telah dilakukan revisi renstra yang disesuaikan dengan hasil review RPJMD Tahun 2016-2021.
- b. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tomoni Timur telah direvisi sesuai renstra tahun 2021-2026.
- c. Kurangnya evaluasi kinerja internal yang dilakukan.

5. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya

**Tabel 3.7**  
**Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya**

NO	Jabatan	Hasil Analisis Jabatan		Kondisi saat ini		
		Struktural	Pelaksana	Struktural	Pelaksana	
					PNS	Non PNS
1	Camat	1	-	1	-	-
2	Sekretaris Camat	1	-	1	-	-
3	Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian	1	4	1	1	1
4	Kasubag Umum dan Keuangan	1	5	1	3	3
5	Kasi Pemerintahan Umum	1	6	1	1	-
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	7	1	-	1
7	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	1	9	1	1	-
8	Kasi Pelayanan Umum	1	7	1	-	1
<b>JUMLAH</b>		<b>8</b>	<b>38</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>TOTAL</b>		<b>46</b>		<b>20</b>		

Sumber : Dokumen ANJAB dan ABK

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah dan syarat pemangku jabatan pelaksana pada Kantor Kecamatan Tomoni Timur belum sesuai dengan hasil analisis jabatan Kecamatan Tomoni Timur yang dibuat oleh Bagian Organisasi SETDA Kabupaten Luwu Timur selain karena sebagian jabatan pelaksana masih diisi oleh Non PNS (tenaga upah jasa) juga masih banyak terdapat jabatan lain yang kosong yang seharusnya terisi untuk mengoptimalkan pelayanan.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian sasaran 2 (dua) yaitu meningkatnya pelayanan publik di Kecamatan Tomoni Timur adalah :

**A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :**

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Target dalam sub kegiatan ini adalah tersusunnya 2 (dua) dokumen perencanaan Perangkat Daerah, dalam 1 (satu) tahun, terdapat 2 (dua) dokumen Perencanaan yang disusun oleh Kantor Kecamatan Tomoni Timur, diantaranya adalah Renja Pokok dan Renja Perubahan.

❖ **Hambatan :**

a) Keterbatasan data dan informasi dari masing-masing sub bagian dan kepala seksi yang di butuhkan dalam penyusunan dokumen perencanaan sehingga seringkali penyusunan dokumen perencanaan mengalami keterlambatan.

b) Kurangnya koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan.

❖ **Solusi:**

a) Lebih meningkatkan koordinasi antara sesama unsur-unsur terkait dalam hal ini masing-masing Seksi dan Sub Bagian.

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Target dalam sub kegiatan ini adalah tersusunnya 2 (dua) dokumen RKA-SKPD, dalam 1 (satu) tahun, terdapat 2 (dua) dokumen RKA-SKPD yang disusun oleh Kantor kecamatan Tomoni Timur, diantaranya adalah RKA-SKPD Pokok dan RKA-SKPD Perubahan.

c. Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD

Target dalam sub kegiatan ini adalah tersusunnya 2 (dua) dokumen DPA-SKPD, dalam 1 (satu) tahun, terdapat 2 (dua) dokumen DPA-SKPD yang disusun oleh Kantor

kecamatan Tomoni Timur, diantaranya adalah DPA-SKPD Pokok dan DPA-SKPD Perubahan.

d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian program, kendala yang dihadapi yaitu pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan dan rencana pendanaan masih bersifat satu arah dimana keterlibatan seksi dan sub bagian masih sangat minim.

❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan beberapa solusi yaitu :

- a) Menekankan kepada kepala seksi melalui Camat dan Sekcam untuk lebih berkontrobusi dalam penyusunan laporan salah satunya dengan menyiapkan bahan yang diperlukan dalam penyusunan LAKIP.
- b) Meningkatkan komunikasi Tim LAKIP

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Target dalam sub kegiatan ini adalah terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN di kantor kecamatan Tomoni Timur sebanyak 14 orang. Tidak ditemukan hambatan dalam pelaksanaan sub kegiatan ini di kantor Kecamatan Tomoni Timur.

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah

a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Target dari sub kegiatan ini adalah barang yang disediakan untuk mendukung pelaksanaan kinerja di kantor kecamatan Tomoni Timur dilaksanakan dengan persentase 100%.

❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian sub kegiatan, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- a) Pengurus barang belum maksimal dalam menyediakan sebagian kebutuhan kantor (ATK).
- b) Inventarisasi barang milik daerah masih belum maksimal.

❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan solusi yaitu :

- a) Tetap memaksimalkan anggaran yang tersedia dalam melaksanakan program/kegiatan.
- b) Melakukan inventarisasi kebutuhan barang milik daerah pada setiap ruangan, persediaan setiap triwulan.

4) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

❖ **Hambatan/Kendala**

Sejak akhir TW 2 Tahun 2021 pemerintah kecamatan sudah tidak lagi melakukan pemungutan retribusi dalam hal hal ini retribusi pengurusan IMB disebabkan oleh karena kewenangannya sudah diambil alih oleh DPMPTSP

5) Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah

- a. Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan

❖ **Hambatan/Kendala**

Tidak ditemukan kendala dalam sub kegiatan ini, target ASN yang mengikuti pelatihan sesuai dengan target yaitu 3 orang ASN

- 6) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor;
  - b. Penyediaan peralatan rumah tangga;
  - c. Penyediaan bahan logistic kantor
  - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
  - e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
  - f. Fasilitasi kunjungan tamu;
  - g. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian program, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- a) Terjadi anggaran untuk memenuhi kebutuhan anggaran pengadaan kendaraan dinas operasional camat.
- b) Kurangnya koordinasi antara PPTK dan pengurus barang terkait rencana kebutuhan barang.

❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan solusi yaitu :

- a) Tetap memaksimalkan anggaran yang tersedia dalam melaksanakan program/kegiatan.
- b) Melakukan inventarisasi kebutuhan barang dan ATK setiap ruangan, persediaan setiap triwulan.
- c) Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder.

- ❖ Adapun hal yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator tersebut yaitu koordinasi dan komunikasi yang baik antar pimpinan dan staf

- 7) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

❖ **Hambatan/Kendala**

- a) Tidak terdapat kendala dalam kegiatan ini semua terlaksana 100% dan tepat waktu.

- 8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

❖ **Hambatan/Kendala**

Tidak terdapat kendala dalam kegiatan ini

- 9) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian program, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- a) Anggaran yang tersedia dengan kebutuhan pemeliharaan masih belum seimbang sehingga beberapa barang inventaris belum terpelihara dengan baik hal ini disebabkan oleh karena belum terinventaris dengan baik barang – barang yang mausk dalam kategori Baik, Kurang Baik dan Rusak Berat.

❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan solusi yaitu :

- a) Tetap memaksimalkan anggaran yang tersedia dalam melaksanakan program/kegiatan.

b) Melakukan inventarisasi barang yang lebih mendalam dalam menentukan kategori kondisi barang inventaris..

- ❖ Adapun hal yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator tersebut yaitu pada umumnya kegiatan yang apa pada program Penunjang Urusan Permerintah Daerah berjalan dengan baik.

### 3.2. Realisasi Anggaran

Anggaran APBD untuk Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 adalah sebesar Rp 2.661.733.250,- Sedangkan Realisasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 2.624.183.918,- dengan capaian **98,59%** . Secara rinci alokasi anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8  
Realisasi Anggaran Tahun 2023

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN T.A 2023  
KANTOR KECAMATAN TOMONI TIMUR  
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN I/II/III/IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DESEMBER 2023	
				(Rp.)	(%)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.519.931.950</b>	<b>2.519.931.950</b>	<b>2.488.352.418</b>	<b>98,75</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>52.068.000</b>	<b>52.068.000</b>	<b>51.284.100</b>	<b>98,49</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.945.000	19.945.000	19.822.000	99,38
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.784.000	2.784.000	2.641.500	94,88
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.786.000	2.786.000	2.446.000	87,80

4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.553.000	26.553.000	26.374.600	99,33
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.529.465.550</b>	<b>1.529.465.550</b>	<b>1.527.320.412</b>	<b>99,86</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	1.507.703.550	1.507.703.550	1.505.604.412	99,86
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	21.762.000	21.762.000	21.716.000	99,79
	<b>Adminstrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>12.480.000</b>	<b>12.480.000</b>	<b>12.305.000</b>	<b>98,60</b>
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.480.000	12.480.000	12.305.000	98,60
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>35.456.000</b>	<b>35.456.000</b>	<b>30.001.000</b>	<b>84,61</b>
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6.996.000	6.996.000	6.741.000	96,36
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan-Perundang undangan	28.460.000	28.460.000	23.260.000	81,73
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>409.409.000</b>	<b>409.409.000</b>	<b>403.446.160</b>	<b>98,54</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.080.000	3.080.000	3.080.000	100,00
2	Penyediaan bahan logistik kantor	5.567.000	5.567.000	5.567.000	100,00
3	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	7.425.000	7.425.000	7.425.000	100,00
4	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	6.240.000	6.240.000	6.225.000	99,76
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	162.765.000	162.765.000	158.169.000	97,18
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	224.332.000	224.332.000	222.980.160	99,40
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>71.000.000</b>	<b>71.000.000</b>	<b>67.300.000</b>	<b>94,79</b>
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.000.000	36.000.000	36.000.000	100,00

2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.000.000	35.000.000	31.300.000	89,43
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>159.173.400</b>	<b>159.173.400</b>	<b>146.460.446</b>	<b>92,01</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat	13.635.000	13.635.000	13.465.000	98,75
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.538.400	27.538.400	16.795.446	60,99
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	13.000.000	13.000.000	11.200.000	86,15
4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	105.000.000	105.000.000	105.000.000	100,00
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah</b>	<b>250.880.000</b>	<b>250.880.000</b>	<b>250.235.300</b>	<b>99,74</b>
1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	18.000.000	18.000.000	17.726.000	98,48
2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	7.000.000	7.000.000	7.000.000	100,00
3	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	225.880.000	225.880.000	225.509.300	99,84
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>9.891.000</b>	<b>3.226.000</b>	<b>2.497.000</b>	<b>77,40</b>
	<b>Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat</b>	<b>3.226.000</b>	<b>3.226.000</b>	<b>2.497.000</b>	<b>77,40</b>
1	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	3.226.000	3.226.000	2.497.000	77,40

		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>6.665.000</b>	<b>6.665.000</b>	<b>6.575.000</b>	<b>98,65</b>
	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6.665.000	6.665.000	6.575.000	98,65
<b>3</b>		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>74.615.300</b>	<b>74.615.300</b>	<b>70.390.000</b>	<b>94,34</b>
		<b>Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa</b>	<b>74.615.300</b>	<b>74.615.300</b>	<b>70.390.000</b>	<b>94,34</b>
	1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	13.315.000	13.315.000	11.791.500	88,56
	2	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	61.300.300	61.300.300	58.598.500	95,59
<b>4</b>		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>12.280.000</b>	<b>12.280.000</b>	<b>11.710.000</b>	<b>95,36</b>
		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>12.280.000</b>	<b>12.280.000</b>	<b>11.710.000</b>	<b>95,36</b>
	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.365.000	7.365.000	7.020.000	95,32
	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4.915.000	4.915.000	4.690.000	95,42
<b>5</b>		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>19.792.000</b>	<b>98,96</b>

		<b>Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>19.792.000</b>	<b>98,96</b>
		Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	20.000.000	20.000.000	19.792.000	98,96
<b>6</b>		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>25.015.000</b>	<b>25.015.000</b>	<b>24.867.500</b>	<b>99,41</b>
		<b>Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</b>	<b>25.015.000</b>	<b>25.015.000</b>	<b>24.867.500</b>	<b>99,41</b>
	1	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	15.000.000	15.000.000	14.866.500	99,11
	2	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan	10.015.000	10.015.000	10.001.000	99,86
		<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>2.661.733.250</b>	<b>2.655.068.250</b>	<b>2.617.608.918</b>	<b>98,59</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

---

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Tomoni Timur Tahun 2023 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan. Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan 2 (dua) sasaran yang didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, serta Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tomoni Timur Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan persentase capaian dari 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Tomoni Timur Tahun 2023 hanya 1 sasaran yang bisa digambarkan capaian kinerjanya yaitu sasaran 1 (satu) survei kepuasan masyarakat dengan realisasi baik 91,72 dari target 87,88. Sedangkan sasaran ke 2 (dua) yaitu Nilai LAKIP belum bisa digambarkan capaiannya disebabkan penilaian LAKIP untuk Tahun 2023 baru akan dilaksanakan pada Triwulan I tahun 2024. Pada tahun 2023 Kecamatan Tomoni Timur telah menggunakan Anggaran Belanja sebesar Rp. 2.624.183.918,- dari total pagu sebesar Rp. 2.661.733.250,- setara dengan 98,59% dari anggaran indikatif yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Tomoni Timur telah optimal.

Pada tahun 2023 terdapat beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran Kecamatan Tomoni Timur meliputi :

1. Keterbatasan data. Data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan LAKIP baik data internal maupun eksternal masih sangat terbatas.
2. Belum samanya pemahaman mengenai materi LAKIP bagi pelaksana kegiatan sehingga dalam penentuan Rencana Kinerja terutama

penetapan indikator kinerja masing-masing kegiatan belum sesuai dengan definisi yang diuraikan dalam Pedoman Penyusunan LAKIP (Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis PK, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas LKIP). Pada umumnya pelaksana kegiatan masih kesulitan dalam menentukan target indikator outcomes secara kuantitatif.

3. Pengembangan kelembagaan pada umumnya belum dilaksanakan secara optimal sehingga masyarakat yang ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan hanya aktif pada masa-masa tertentu saja selama kegiatan itu berjalan (ada anggaran).

❖ Langkah Antisipatif :

1. Langkah-langkah antisipatif dalam upaya memecahkan masalah terutama lebih ditingkatkan koordinasi baik pada tingkat kabupaten maupun instansi terkait dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.
2. Melakukan kajian-kajian perencanaan yang lebih akurat.
3. Mengintensifkan koordinasi internal program dan kegiatan.
4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap perjanjian kinerja secara berjenjang.
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia melalui bimtek/diklat.
6. Menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai.
7. Memaksimalkan kinerja dan pelayanan dengan sumber daya manusia yang terbatas.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja kepada pihak-pihak terkait.

Tomoni Timur, Januari 2024  
Camat Tomoni Timur

**Herpik, SKM, M.Kes**  
NIP. 19660814 198903 1 016